

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan tahap lebih lanjut dari implementasi penganggaran berbasis kinerja. Menurut PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/Lembaga (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Monitoring dan Evaluasi (M&E) pada sektor publik berfokus pada pengalaman (*experience*) untuk meningkatkan pemberian layanan, merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hal tersebut menjelaskan dan memperkuat kesadaran serta minat lembaga-lembaga pemerintah untuk berfokus pada hasil, tidak terkecuali dalam hal penganggaran.

Penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dinilai oleh KemenPAN-RB dimana nantinya akan menghasilkan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, secara teknis dibuat melalui analisis standar pengukuran yaitu pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Alat atau tools dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang menghasilkan berbagai macam produk akhir, seperti LAKIN yang dinilai KemenPAN-RB, Evaluasi Kinerja Anggaran oleh DJA dan Reviu Pelaksanaan Anggaran & Spending Review oleh DJPb, menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas informasi yang dilaporkan, beban pelaporan, permintaan informasi yang berlebihan, kesenjangan informasi, akses ke informasi, dan koordinasi kebijakan Monev secara keseluruhan. Keberagaman tersebut juga memungkinkan terjadinya perbedaan penilaian dalam setiap tools karena pihak yang menilai pun berbeda.

Penulis tertarik meninjau Laporan Kinerja sebagai salah satu tools monitoring dan evaluasi anggaran untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dinilai oleh KemenPAN-RB. Ketertarikan penulis didasarkan pada instansi penilai

tools Monev yang diluar lingkup Kementerian Keuangan dan keingintahuan akan capaian kinerja serta penyebab kenaikan atau penurunannya di instansi yang dijadikan objek penelitian karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “TINJAUAN ATAS LAPORAN KINERJA PADA KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 DAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya

1. Apakah terjadi penurunan atau peningkatan Capaian Kinerja pada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021?
2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan penurunan atau peningkatan Capaian Kinerja?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah

1. Mengetahui penurunan atau peningkatan Capaian Kinerja pada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021
2. Mengetahui masalah yang dihadapi oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan penurunan atau peningkatan Capaian Kinerja.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan atau pengamatan. Fokus dalam karya tulis ini adalah peninjauan Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Kanwil DJPB Jawa Tengah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu

akan dilakukan penelitian atau analisis mengenai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran melalui Laporan Kinerja.

Terkait lokasi peninjauan, penetapan peninjauan dapat ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penulisan (Sugiyono, 2010). Peninjauan karya tulis ini dilakukan dalam lingkungan instansi pemerintah yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Jawa Tengah. DJPB dipilih menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan kepraktisan dalam mendapatkan data dan menjalankan proses penulisan. Kemudian terkait dengan tahun penelitian, penulis memilih tahun dimana saat pandemi Covid-19, lalu pada saat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah

- a. Bagi Penulis, Menjadi penambah wawasan bagi penulis khususnya mengenai monitoring dan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah, dan mengetahui perbandingan antara teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan dengan implementasi sebenarnya yang terjadi di lapangan, serta tugas akhir ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk lulus dari PKN STAN.
- b. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah yang tertuang dalam Laporan Kinerja.
- c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Pada dasarnya, KTTA ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dalam bagian utama, terdapat empat bab dimana setiap bab terdiri dari berbagai subbab yang terkandung dalam karya tulis ini. Sistematika dari pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan diuraikan mengenai gambaran umum dari karya tulis tugas akhir ini. Gambaran umum tersebut memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, serta sistematika dari penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori diuraikan mengenai konsep dasar yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas. Penulisan konsep dasar tersebut mengacu pada berbagai kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB), Nota Dinas serta regulasi terkait lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian metode dan pembahasan diuraikan mengenai penggunaan metode dalam pengumpulan informasi terkait penulisan karya tulis ini. Selain itu, pada bagian ini juga memuat mengenai gambaran objek penelitian yang dalam hal ini ialah Kanwil DJPB Jawa Tengah, data capaian kinerja dan pembahasan hasil.

Uraian pembahasan hasil terdiri dari analisis hasil implementasi Laporan Kinerja pada tahun 2020 dan 2021 dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran serta analisis masalah/kendala yang timbul selama pelaksanaan implementasi LAKIN.

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian simpulan diuraikan kesimpulan atas penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.